

OPTIMALISASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) BAGI PELAKU USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DALAM UPAYA MENINGKATKAN NILAI REALISASI INVESTASI DI KABUPATEN SUMBA BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Herybertus Ndama Nggilik¹, Petrus Kase², Agus Susanto³

Universitas Terbuka, Indonesia^{1,3}

Universitas Nusa Cendana, Indonesia²

Email: herynggilik@gmail.com¹, petruskase08@gmail.com², sugus.susanto@gmail.com³

Abstrak

Berdasarkan data dari *depkop.go.id*, perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia sejak 2010 menunjukkan tren positif, termasuk di Kabupaten Sumba Barat, dengan 1.671 wirausaha UMKM yang tercatat pada tahun 2022 di enam kecamatan. Meskipun UMKM berperan signifikan dalam perekonomian, permasalahan utama yang dihadapi adalah keterbatasan permodalan, yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi. Salah satu solusi permodalan yang ditawarkan adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Namun, penyerapan KUR belum optimal, karena jumlah UMKM yang berbadan usaha sangat rendah, kurang dari dua persen dari total usaha kecil dan menengah. Selain itu, komunikasi yang kurang efektif antara pemerintah, perbankan, dan UMKM menghambat optimalisasi penyaluran dana KUR. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi regulasi dan skema KUR serta menyusun strategi implementasi kebijakan KUR bagi UMKM di Kabupaten Sumba Barat. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUR telah membantu UMKM mendapatkan modal tambahan untuk pengembangan usaha, mendorong kreativitas masyarakat, dan memperluas sektor perdagangan. Namun, penyaluran KUR masih dominan pada sektor perdagangan, sementara sektor produktif cenderung menggunakan modal sendiri. Agar implementasi kebijakan KUR lebih optimal, diperlukan strategi berbasis analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats). Strategi ini memungkinkan UMKM memetakan peluang, mengatasi ancaman, dan merancang usaha yang lebih efektif dan efisien, baik secara operasional maupun dalam pengembangan bisnis. Dengan demikian, UMKM dapat lebih berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional.

Kata kunci: Program Kredit Usaha Rakyat (KUR), Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Implementasi Kebijakan, Analisis SWOT (*Strength, Weaknesses, Opportunities, and Threats*).

Abstract

Based on data from depkop.go.id, the development of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia since 2010 has shown a positive trend, including in

West Sumba Regency, with 1,671 MSME entrepreneurs recorded in 2022 across six districts. Despite their significant role in the economy, the main challenge faced by MSMEs is limited access to capital, which can hinder economic growth. One proposed solution is the People's Business Credit (KUR) program. However, the absorption of KUR funds remains suboptimal due to the low number of MSMEs with legal business entities, accounting for less than two percent of the total small and medium enterprises. Furthermore, ineffective communication between the government, banks, and MSMEs has impeded the optimal distribution of KUR funds. This study aims to analyze the optimization of KUR regulations and schemes and develop strategies for the implementation of KUR policies for MSMEs in West Sumba Regency. The research employs a qualitative method with a descriptive approach. The findings indicate that KUR has helped MSMEs obtain additional capital for business development, encouraged community creativity, and expanded the trade sector. However, the distribution of KUR remains focused on the trade sector, while productive sectors tend to rely on self-funding. To ensure more effective implementation of KUR policies, a strategy based on SWOT analysis (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats) is recommended. This strategy enables MSMEs to map opportunities, address threats, and design more effective and efficient business plans, both operationally and in terms of business development. Consequently, MSMEs can contribute more significantly to local and national economic growth.

Keywords: People's Business Credit Program (KUR), Micro, Small and Medium Enterprise (MSMEs), Policy Implementation, SWOT Analysis (Strength, Weaknesses, Opportunities, and Threat

Pendahuluan

Dibalik keunggulan yang dimiliki oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), masih terdapat banyak masalah yang menyelimuti UMKM diantaranya masalah permodalan merupakan masalah utama bagi pelaku UMKM yang secara tidak langsung akan menghambat pertumbuhan ekonomi (Aristanto et al., 2020). Untuk mengatasi permasalahan ini, salah satu solusi permodalan adalah mendapatkan modal melalui pinjaman bank melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) (Atin, 2018; Egawani, 2024; Septiawati, 2023).

Tahun 2021, Pemerintah menerapkan Kebijakan Strategis diantaranya Program Pemulihan Ekonomi (PEN) yang mencakup program dukungan UMKM di antaranya pembiayaan KUR pada masa pandemi dan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) (Marginingsih, 2021; Maryanto et al., 2022; Purnomoratih, 2021). Pemerintah kembali melakukan kerja sama dengan 46 penyalur KUR yang terdiri dari Bank Pemerintah, Bank Swasta, Bank Daerah, Koperasi Simpan Pinjam dan Perusahaan Pembiayaan. Berdasarkan data yang didapat dari BNI Cabang Waikabubak tahun 2021, KUR yang disalurkan oleh BNI sebanyak 62 debitur dengan jumlah penyaluran sebesar Rp.18.175.000.000,00. Hal yang sama dialami oleh BRI Cabang Waikabubak, KUR Mikro maupun KUR Kecil mengalami peningkatan dari tahun 2019 sampai tahun 2021 dengan total penyaluran sebesar Rp.22.148.243.175,00. Data yang diperoleh dari Bank NTT Cabang Waikabubak, tahun 2018 disalurkan kepada 14 debitur dengan total penyaluran sebesar Rp.955.000.000,00 dan kemudian mengalami kendala sehingga pada

tahun 2019, penyaluran KUR mengalami penurunan dan kemudian KUR dihentikan penyalurannya pada tahun 2020.

Namun, penyaluran ini belum dilakukan secara maksimal karena jumlah UMKM yang berstatus badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sangat rendah yakni kurang dari dua persen dari total UMKM (Massuri, 2022; Putri et al., 2023). Di Kabupaten Sumba Barat, jumlah UMKM yang terdaftar di Online *Single Submission* (OSS) sebanyak 107 UMKM (Data diperoleh dari Dinas PMPTSP Kabupaten Sumba Barat). Jumlah UMKM yang terdaftar masih terbilang sangat minim. Disisi lain, pemerintah terus memfokuskan penyaluran KUR dengan menyiapkan berbagai kebijakan dan program lainnya untuk meringankan para pelaku UMKM. Berbagai upaya dan program yang telah diinisiasi oleh pemerintah perlu diperkuat dan didukung oleh berbagai pihak, termasuk sektor swasta agar dapat semakin memberikan manfaat yang optimal bagi UMKM. Kemudahan dalam mengakses KUR juga didapat dari pihak penyalur KUR (pihak perbankan) yaitu tersedianya fasilitas kredit yang besar, suku bunga yang bersaing dan bunga yang diberikan cukup rendah. Keunggulan ini dapat memudahkan para pelaku UMKM. Namun masih terdapat masalah lain yang dihadapi oleh pihak penyalur KUR seperti adanya hambatan dalam pencairan dana, keterlambatan pengurusan oleh pihak Bank dikarenakan permintaan yang semakin meningkat, dan lainnya.

Dari permasalahan-permasalahan yang ada, tujuan penelitian ini adalah menganalisa optimalisasi penyaluran KUR dari pihak perbankan apakah sudah sesuai atau belum dengan standar operasional prosedur, kemudian para pelaku UMKM dalam hal ini mengenai kesiapan usaha para pelaku serta keterlibatan pemerintah terkait kebijakan-kebijakan mengenai KUR. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Implementasi kebijakan model *Merille S Grindle*. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh tingkat implementasi kebijakan itu sendiri yang terdiri dari *Content of Policy* dan *Context of Policy* (Muhtadi, 2020; Sutmasa, 2021). Isi kebijakan meliputi: Kepentingan yang dipengaruhi; Jenis manfaat; Tingkat perubahan visi; Tempat pengambilan keputusan; Pelaksana program; dan Komitmen sumber daya. Sedangkan konteks kebijakan terfokus pada Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor terlibat; Karakteristik kelembagaan dan rezim; serta Kepatuhan dan responsivitas (Maesya, 2015). Sehingga Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi regulasi dan skema KUR serta menyusun strategi implementasi kebijakan KUR bagi UMKM di Kabupaten Sumba Barat.

Metode Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif yaitu prosedur meneliti yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2018). Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif untuk menggambarkan kondisi yang ada berupa data, fakta ataupun informasi yang ada sebagai landasan empiris yang digambarkan secara naratif baik terhadap data kualitatif untuk memberikan rekomendasi terhadap hasil penelitian ini (Aristanto et al.,

2020). Lokasi yang dipilih oleh peneliti yaitu 6 (enam) Kecamatan yang ada di Kabupaten Sumba Barat, meliputi Kota Waikabubak, Loli, Lamboya, Wanukaka, Laboya Barat, dan Tanarighu. Informan dalam penelitian ini yaitu pihak perbankan dalam hal ini Manajer atau Karyawan BRI, BNI, dan Bank NTT yang menangani KUR. Informan dalam penelitian adalah pelaku UMKM di 6 (enam) Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Sumba Barat diambil lima informan setiap kecamatan, serta Perangkat Daerah terkait yaitu Dinas Koperindag dan Dinas PMPTSP. Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan (Ulfathin, 2022). Untuk optimalisasi implementasi menggunakan teknik analisis data SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats*) (Sammuto-Bonnici & Galea, 2015).

Hasil dan Pembahasan

Pengoptimalan regulasi dan skema KUR bagi pelaku UMKM

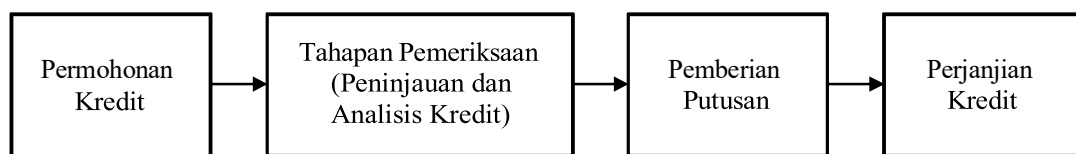
Dalam rangka mensukseskan kebijakan Pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan angka pengangguran, Perbankan bisa menjadi wadah pelaksana kebijakan KUR yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Dilihat dari sisi perbankan yang merupakan lembaga penyedia dana, masih terdapat beberapa persoalan yang menghambat pemberian akses permodalan kepada para pelaku UMKM yaitu belum ada kesiapan dari pelaku UMKM seperti belum ada kelayakan usaha baik dari segi keuangan, pemasaran, tenaga kerja maupun sumber daya lainnya. Jika dilihat dari implementor atau pegawai dalam melaksanakan tugas maupun pekerjaan yang berkaitan dengan KUR, secara kualitas memang sudah tidak diragukan lagi artinya pegawai mampu menjalankan tugas dengan tanggung jawab dan siap menjalankan KUR sesuai SOP. Akan tetapi, jika dilihat dari segi kuantitas diakui masih kurang dan untuk mengatasi hal ini pihak bank harus menyiapkan strategi agar KUR dapat mencapai target dan tetap tepat sasaran meskipun jumlah SDM untuk penyaluran KUR di bank masih minim.

Pada hakekatnya, suatu program dapat dikatakan berhasil apabila diukur dari seberapa besar tingkat sosialisasi yang dilaksanakan dan sosialisasi dapat dijadikan sebuah faktor penting sebagai penentu apakah program yang dijalankan bisa berhasil. Peneliti melihat bahwa masih minimnya sosialisasi mengenai KUR yang dilakukan oleh pihak pemerintah Daerah di beberapa kecamatan yang ada di Sumba Barat. Perlu dipahami bahwa sosialisasi bukan hanya tugas dari pihak perbankan saja, akan tetapi dapat berkolaborasi dengan pemerintah daerah selaku kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Dengan minimnya sosialisasi kepada masyarakat, dapat menghambat kemajuan dari program KUR sehingga tujuan KUR belum tercapai.

Pada akhirnya, dengan melihat kondisi di lapangan, optimalisasi penyaluran KUR oleh perbankan mempunyai dampak terhadap peningkatan kapasitas pelaku UMKM serta adanya peningkatan nilai realisasi investasi di Kabupaten Sumba Barat setiap tahunnya. Dampak KUR terhadap meningkatnya realisasi investasi dapat dilihat dari adanya peningkatan realisasi investasi berdasarkan yang melakukan perizinan di Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat dari tahun 2020 yaitu sebesar 85,121 Milyar atau sekitar 56,75% naik menjadi sebesar 87,513 Milyar atau 58,35% pada tahun 2021. Namun, secara keseluruhan peneliti menemukan bahwa KUR belum sepenuhnya tepat sasaran dan belum merata. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya pelaku usaha yang berada di enam kecamatan yang tersebar di Kabupaten Sumba Barat belum tersentuh KUR bahkan sama sekali tidak mengetahui adanya program KUR.

Para pelaku UMKM yang ingin mendapatkan dana pinjaman dari bank ini dapat menghubungi Pihak perbankan yang ada di Kabupaten Sumba Barat. sumber pendanaan yang digunakan untuk prnyaluran KUR berasal dari Simpanan Dana Pihak Ketiga. Dana ini disediakan oleh Pemerintah yang disalurkan kepada pihak perbankan Artinya, KUR ini diberikan kepada masyarakat yang memiliki kegiatan ekonomi produktif dalam bentuk pinjaman dan akan dikembalikan oleh pelaku usaha dari hasil keuntungan usahanya. Calon debitur yang akan mengajukan permohonan KUR harus mengikuti proses pengajuan yang diberikan oleh Bank, seperti:



Gambar 1. Proses Pengajuan KUR

Untuk calon debitur, KUR memiliki ketentuan dan adapun persyaratan-perayaratn yang harus dipenuhi seperti individu tersebut harus memiliki legalitas yang lengkap seperti KTP/ SIM, KK, dan usaha yang dijalankan, minimal enam bulan sudah beroperasi. Untuk KUR Mikro, maksimum pinjaman sebesar 50juta per debitur dengan tingkat suku bunga sebesar 6% pertahun. Untuk KUR Kecil, batasan pinjaman yang diberikan dari 50-500 juta dengan suku bunga 6% per tahun. Setelah melengkapi persyaratan pengajuan, petugas kredit akan melakukan pree screening terhadap calon debitur dengan mengidentifikasi siklus usaha, dan sebagainya. Setelah dilakukan analisa oleh petugas kredit dan memenuhi kualifikasi, maka selanjutnya dilakukan persetujuan dan perjanjian kredit. Apabila pencairan sudah dilakukan, petugas kredit mempunyai kewajiban untuk melakukan kunjungan kepada debitur dalam rangka memonitoring perkembangan usaha dari debitur, perkembangan jaminan kredit serta potensi debitur untuk melakukan tambahan pinjaman atau *top up*.

Analisis Implementasi Kebijakan KUR

Program KUR merupakan program yang dicanangkan oleh Pemerintah dan ditunggu-tunggu oleh pelaku usaha. Tentunya dikeluarkan program ini bisa membantu para pelaku usaha yang mengalami kesulitan keuangan untuk mengakses permodalan karena usaha merka belum layak jika diajukan untuk pinjaman komersial (*bankable*).

Pemerintah juga memberikan kemudahan yaitu memberikan tingkat suku bunga yang rendah dan persyaratan pengajuan yang mudah. Ini merupakan kemudahan yang diberikan oleh pemerintah sehingga para pelaku usaha tertarik untuk menggunakan KUR.

Berdasarkan hasil penelitian, penyaluran KUR yang ada di Sumba Barat sudah tepat sasaran karena ketika menyalurkan KUR, pihak perbankan sudah memberikan sesuai dengan SOP ataupun aturan yang sudah ditetapkan. Akan tetapi, berdasarkan hasil observasi di lapangan yang dilakukan oleh peneliti, penyaluran KUR masih berfokus di sektor perdagangan dibandingkan dengan sektor produktif sehingga para pelaku usaha sektor produktif banyak yang menggunakan modal sendiri. Pengawasan yang kurang juga dapat memicu terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi yang menyebabkan KUR menjadi tidak tepat sasaran. Selain itu, andil dari Pemerintah Daerah dalam berkolaborasi dengan pihak perbankan masih kurang. Artinya bukan hanya Bank saja pada saat memberikan pinjaman, Bank juga yang harus kawal karena Bank juga punya keterbatasan sehingga mungkin fungsi kontrol bisa dilakukan pihak pemerintah daerah dalam hal ini perangkat daerah terkait yang berhubungan sehingga usaha yang dijalankan bisa berjalan. Perlu adanya kerja sama baik dari pemerintah daerah untuk membantu pengawalan. Karena, jika tidak ada pengawalan, dana pinjaman KUR bisa disalahgunakan untuk kebutuhan yang lainnya. Agar program ini berjalan dengan baik, perlu dilakukan pengawasan yang ketat untuk menghindari pemanfaatan oleh Pihak yang sebenarnya tidak membutuhkan dan didukung dengan aturan atau kebijakan yang sesuai.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti, komunikasi yang dibangun antar pihak Perbankan dan pemilik UMKM sudah cukup efektif. Terlihat di beberapa daerah yang tersebar di Kabupaten Sumba Barat, komunikasi yang dilakukan berupa *on the spot* atau penjelasan langsung kepada pelaku usaha tentang program KUR baik itu manfaat, persyaratan, prosedur, dan sebagainya. Tidak hanya komunikasi secara langsung, beberapa Bank juga melakukan komunikasi melalui media informasi seperti brosur, spanduk maupun media sosial. Akan tetapi, penyebaran KUR di Kabupaten Sumba Barat belum merata. Belum semua pelaku UMKM yang berada di beberapa kecamatan mendapatkan akses KUR dari perbankan. Hal ini dikarenakan masih minimnya pengetahuan dan pemahaman pemilik usaha dalam memperoleh informasi program KUR karena masih minim juga sosialisasi dari pihak pemerintah melalui perbankan untuk para pelaku usaha. Oleh karena itu, pihak perbankan diharapkan untuk tidak fokus pada daerah-daerah tertentu saja dalam melakukan komunikasi terhadap para pelaku UMKM. Pihak perbankan juga harus melakukan komunikasi secara langsung terhadap para pelaku usaha yang belum sama sekali tersentuh dengan adanya KUR.

Hasil analisis kualitatif dalam penelitian ini menunjukkan bahwa program KUR yang diberikan oleh perbankan pada hakekatnya merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan Masyarakat. Program KUR juga sudah cukup siap untuk diimplementasikan meskipun masih ada beberapa aspek yang belum layak seperti

komunikasi yang belum efektif antara pihak pemerintah, perbankan dan para pelaku usaha.

Kendala yang dialami KUR dalam mengembangkan UMKM

Selama melakukan penelitian, peneliti menemukan beberapa kendala yang dialami oleh perbankan maupun pihak pemerintah dalam penyaluran KUR. Kendala yang dihadapi seperti masih kurangnya pemahaman masyarakat khususnya pelaku UMKM terhadap keberadaan program KUR. Kendala berikutnya adalah banyak debitur atau pelaku UMKM yang salah mengartikan bahwa KUR bisa diperuntukkan bagi siapa saja, padahal program KUR mempunyai kriteria tertentu misalnya usaha yang berjalan minimal 6 bulan. Tantangan lain yang dihadapi oleh pihak perbankan biasanya nasabah yang melakukan pengajuan KUR terkadang membagi kreditnya dengan orang lain. Artinya, debitur yang mengajukan pinjaman tidak menggunakan uang tersebut. Kendala lain adalah keterlambatan pelunasan yang disebabkan usaha pelaku UMKM mengalami kemunduran, sikap yang kurang kooperatif dari pelaku UMKM ataupun ada kebutuhan yang mendesak yang menyebabkan adanya penunggakan.

Kendala-kendala yang ditemukan oleh Peneliti di Lapangan

Ada beberapa kendala yang peneliti temukan saat melakukan penelitian ini adalah masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami kebijakan KUR. masih banyak masyarakat yang belum paham akan alur peminjaman dana KUR sampai pada proses pembayarannya setiap bulan. Selain itu, ada ketakutan masyarakat jika berurusan dengan Bank. Walaupun sebagian pelaku usaha menganggap bahwa KUR merupakan suatu angin segar, akan tetapi bagi sebagian pelaku usaha belum tertarik dengan pembiayaan KUR dengan berbagai alasan.

Upaya-upaya dalam mengimplementasikan KUR

Dalam menjalankan suatu kebijakan seringkali kita menemukan masalah atau kendala yang dihadapi. Masalah atau kendala tersebut akan dicarikan solusi atau jalan keluar agar masalah yang ada dapat teratasi. Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah memberikan sosialisai kepada pelaku UMKM baik secara lisan maupun tulisan tentang kebijakan KUR. Tidak hanya pihak perbankan saja yang melakukan sosialisasi, tetapi pihak pemerintah turut mengambil andil dalam melakukan sosialisasi terkait KUR melaui perangkat daerah terkait. Sosialisasi yang dilaksanakan harus merata di setiap wilayah kecamatan hingga ke desa yang ada di Kabupaten Sumba Barat.

Strategi Implementasi Kebijakan KUR bagi Pelaku UMKM di Kabupaten Sumba Barat menggunakan Analisis SWOT

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat dijelaskan analisis SWOT yang ditinjau dari pihak perbankan, pemerintah daerah dan pelaku UMKM :

Strategi Strength – Opportunities (SO)

- 1) Program KUR dapat terus ada untuk mengembangkan UMKM karena ada dukungan penuh dari masyarakat.
- 2) Pelayanan SDM yang baik sehingga dapat menarik minat pelaku UMKM.
- 3) Program yang dapat berkembang dengan baik yang didukung dengan pelayanan dan fasilitas yang disediakan sehingga bisa berfokus pada sektor lain selain perdagangan seperti pertanian, perikanan dan industri.
- 4) Dengan adanya kebijakan, yang dikeluarkan oleh pemerintah, pelaku UMKM semakin dimudahkan untuk mengakses KUR.
- 5) Pelaku usaha mampu mengembangkan usahanya, memperluas pangsa pasar dengan tambahan modal yang diperoleh.
- 6) Para pelaku UMKM mampu membantu mengembangkan usaha, menciptakan lapangan pekerjaan sehingga para pelaku usaha tersebut dapat mengakses tambahan modal.
- 7) Para pelaku UMKM lebih mudah menjalankan ide seperti pemasaran, dan pengembangan produk sehingga dapat dengan cepat memperluas pasar dan menembus pasar barang.

Strategi Weaknesses – Opportunities (WO)

- 1) Tidak hanya sektor perdagangan, perbankan akan merangsang tumbuh kembang usaha melalui sektor pertanian dan peternakan sehingga semakin banyak pelaku usaha yang tersentu KUR.
- 2) Memperbanyak jumlah SDM yang akan menangani KUR agar tidak terjadi penumpukan atau keterlambatan dalam pengajuan.
- 3) Dengan adanya dukungan KUR dari masyarakat, Pihak Bank dapat melakukan sosialisasi terkait KUR secara on the spot agar komunikasi yang dibangun bisa lebih efektif.
- 4) Memberikan pelatihan, pendampingan serta memfasilitasi para pelaku UMKM agar menjadi layak pada saat pengajuan KUR sehingga tercipta kolaborasi yang baik antara ketiga pihak yang saling berkaitan.
- 5) Melakukan pendataan secara berkala terhadap para pelaku UMKM dengan mengoptimalkan tenaga pendamping dari Instansi pemerintah terkait untuk mengontrol jumlah pelaku UMKM.
- 6) Para pelaku UMKM dapat mengakses tambahan modal.
- 7) Dengan limit plafon yang lebih tinggi, para pelaku usaha akan lebih mengembangkan usahanya.

Strategi Strength – Threats (ST)

- 1) Masing-masing dari ke tiga bank sudah mempunyai nama, pelayanan dari SDM yang menarik, kompeten serta fasilitas yang disediakan cukup memadai sehingga dapat mengatasi persaingan antara ketiga bank tersebut.
- 2) Pihak perbankan telah menerapkan kebijakan KUR yang dikeluarkan pemerintah sehingga dapat melakukan analisa kelayakan dari pelaku UMKM yang memenuhi semua kriteria yang telah ditentukan oleh Bank.
- 3) Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah semakin mempermudah pelaku usaha serta terus membuka lapangan kerja baru sehingga sektor UMKM menjadi semakin kuat.
- 4) Salah satu kebijakan KUR yaitu tidak memerlukan agunan tambahan yang dapat menarik minat pelaku usaha sehingga target penyerapan bisa terpenuhi di semua sektor.
- 5) Pelaku UMKM mampu mengembangkan usahanya dengan ide-ide seperti pengembangan produk usaha sehingga mereka mampu mengatasi masalah keuangan.

Strategi Weaknesses - Threats (W-T)

- 1) Penyaluran KUR beberapa Bank tidak terpusat pada satu sektor saja seperti sektor perdagangan agar terhindar dari persaingan yang tinggi untuk mendapatkan calon nasabah.
- 2) Menambah kuantitas SDM agar pihak bank tidak merasa kewalahan dan tidak merasa kesulitan ketika melakukan analisa kelayakan dan kriteria dari calon nasabah pelaku usaha.
- 3) Melakukan kolaborasi dengan pemerintah dalam melakukan sosialisasi KUR kepada pelaku usaha agar para pelaku usaha paham jika bantuan KUR harus dikembalikan dan bukan diberikan secara cuma-cuma.
- 4) Sosialisasi KUR akan efektif jika dilakukan bersama dengan pihak Bank yaitu secara langsung (on the spot) hingga ke tingkat desa untuk memperkuat UMKM sehingga mampu mengatasi tantangan ekonomi kedepannya.
- 5) Memahami kriteria atau persyaratan yang ditentukan oleh Bank sehingga tidak merasa kesulitan ketika akan mengakses KUR.
- 6) Merencanakan manajemen keuangan yang baik sehingga tidak menghambat kemampuan membayar kepada Bank ketika mengalami kesulitan keuangan.

Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang didapat adalah implementasi kebijakan KUR dalam pengembangan UMKM dinilai belum optimal. Secara teknis/operasional, analisis implementasi kebijakan belum terlaksana dengan baik, baik dari segi komunikasi, sumber daya (manusia) dan sumber daya lain (finansial). Kenyataan yang terjadi di lapangan adalah minimnya komunikasi yang dibangun antara perbankan dengan pelaku UMKM seperti penjelasan langsung kepada pelaku UMKM. Strategi yang dapat

diterapkan perbankan, pemerintah daerah maupun pelaku UMKM adalah perbankan dapat merangsang tumbuh kembang usaha melalui sektor pertanian dan peternakan tidak hanya sektor perdagangan saja sehingga semakin banyak pelaku UMKM yang tersentuh KUR, memperbanyak SDM yang menangani KUR, dan melakukan sosialisasi KUR secara *on the spot* kepada pelaku UMKM. Selain itu, pemerintah daerah juga memberikan pelatihan kepada pelaku UMKM, serta melakukan pendataan secara berkala bagi pelaku UMKM.

Saran yang dapat peneliti sampaikan yaitu penyerapan KUR harus terus dioptimalkan baik oleh perbankan maupun pemerintah daerah agar KUR dapat dinikmati secara merata di semua sektor, tidak hanya dinikmati di sektor perdagangan saja, tetapi juga sektor produktif. Karena berdasarkan fakta di lapangan, dari sekian banyak informan, sektor produktiflah yang belum banyak mendapatkan sentuhan KUR. Untuk mengoptimalkan KUR diperlukan penguatan kolaborasi antara perbankan dan pemerintah daerah untuk melakukan sosialisasi mengenai KUR dari tingkat desa agar masyarakat yang berada di desa-desa juga bisa memahami maksud dan tujuan KUR. Selain itu, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan tenaga pendamping dari instansi terkait untuk mendata para pelaku UMKM setiap kecamatan agar pemerintah daerah dengan mudah mengontrol pelaku UMKM yang sudah maupun belum mengakses KUR.

BIBLIOGRAFI

- Aristanto, E., Khourouh, U., & Ratnaningsih, C. S. (2020). Dinamika Kebijakan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 8(1). <https://doi.org/10.26905/jmdk.v8i1.4247>
- Atin, T. D. N. (2018). Pengaruh Efektivitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Peningkatan Profit Usaha Mikro (Studi Kasus Pada Nasabah Bank Rakyat Indonesia Unit Purwomartani Kalasan Sleman Yogyakarta). *Jurnal Pendidikan Dan Ekonomi*, 8(1).
- Egawani. (2024). Pengaruh Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Pendapatan Usaha Pada UMKM. *Akuntansi* 45, 5(1). <https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v5i1.2467>
- Maesya, A. A. (2015). *Implementasi Kebijakan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Warung Gunung Kabupaten Lebak*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Marginingsih, R. (2021). Program Pemulihan Ekonomi Nasional Sebagai Kebijakan Penanggulangan Dampak Pandemi Covid-19 Pada Sektor UMKM. *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2). <https://doi.org/10.31294/moneter.v8i2.10997>
- Maryanto, M., Chalim, M. A., & Hanim, L. (2022). Upaya Pemerintah Dalam Membantu Pelaku Usaha Umkm Yang Terdampak Pandemi COVID-19. *Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum*, 1(01). <https://doi.org/10.24967/jaeap.v1i01.1484>
- Massuri, A. A. (2022). Analisis Yuridis Terkait Izin yang Dikeluarkan Online Single Submission (OSS) sebagai Beschikking Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. *Bandung Conference Series: Law ...*, 02.
- Moleong, L. J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. *PT Remaja Rosdakarya*.

- Muhtadi, Y. (2020). Implementasi Kebijakan Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Kota Tangerang. *Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah*, 20(2). <https://doi.org/10.33592/pelita.vol20.iss2.821>
- Purnomoratih, Y. (2021). Efektivitas Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Menopang Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Selatan. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 2(1). <https://doi.org/10.33105/jmp.v2i1.366>
- Putri, K. A., Fendri, A., & Hasbi, M. (2023). Pendaftaran Izin Usaha Perseroan Terbatas Melalui Sistem Online Single Submission di Kabupaten Solok-Selatan. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(3). <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i3.411>
- Sammot-Bonnici, T., & Galea, D. (2015). SWOT analysis. *Wiley Encyclopedia of Management*, 1–8.
- Septiawati, R. (2023). Pengaruh Kredit Usaha Rakyat, Modal Sendiri , Kabupaten Karawang. *Jurnal Pengembang Masyarakat*, 4(4).
- Sutmasa, Y. G. (2021). Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 4(1). <https://doi.org/10.47532/jic.v4i1.242>
- Ulfathin, N. (2022). Metode penelitian kualitatif di bidang pendidikan: Teori dan Aplikasinya. *Edukasi*.

Copyright holder:

Herybertus Ndama Nggilik, Petrus Kase, Agus Susanto (2025)

First publication right:

Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia

This article is licensed under:

